

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN
DI KECAMATAN LHOKNGA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Haikal Maulana
NIM.210802068**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haikal Maulana
NIM : 210802068
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Kp. Pukat, 16 Juni 2003
Alamat : Gampong Pukat, Pidie, Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2025
Yang Menyatakan,



Haikal Maulana
NIM. 210802068

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN DI
KECAMATAN LHOKNGA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

HAIKAL MAULANA

210802068

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:
Pembimbing I


Dr. Saiful Amirul Kamar. MM.,MSi.
NIP. 196110051982031007

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
(BPBA) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN
DI KECAMATAN LHOKNGA**

SKRIPSI

HAIKAL MAULANA

210802068

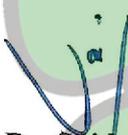
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2024 M
30 Rajab 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

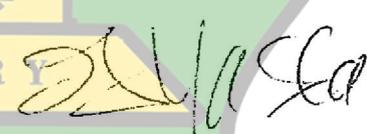

Dr. Said Amirul Kamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007


Muhibbah, M.Ag
NIP.

Penguji I,

Penguji II,


Muazzinah, B.SC., M.P.A
NIP. 198411252019032012


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kekeringan merupakan bencana alam yang sering mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah yang paling rentan terhadap kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan untuk masyarakat dan kepada setiap daerah dalam penanggulangan bencana. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam penanggulangan bencana kekeringan melalui indikator pengukuran *Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami peran BPBA dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Aceh Besar Khususnya di Kecamatan Lhoknga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBA berperan penting dalam penanggulangan bencana kekeringan melalui tiga tahap, yaitu pertama, tahap pra bencana dengan memberikan pelatihan terkait mitigasi bencana kepada masyarakat, kedua, tahap tanggap darurat dalam menangani kekeringan dengan melakukan upaya-upaya penanggulangan yang diperlukan, serta ketiga, tahap pasca bencana dengan membangun infrastruktur untuk penanggulangan kekeringan, meskipun BPBA telah menjalankan perannya yang sesuai dengan teori peran dari Soerjano Soekanto. Terdapat pula hambatan dalam proses penanggulangan Bencana seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana serta keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, BPBA perlu terus untuk meningkatkan edukasi, sosialisasi dan membuat infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan untuk menghadapi bencana kekeringan.

Kata Kunci: Kekeringan, BPBA, Pasca Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "*Peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Kecamatan Lhoknga*" dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah mewariskan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup dan sumber ilmu pengetahuan.

Sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas UIN Ar-Raniry. Dengan berbagai tekanan, masalah, serta dilema penulis tetap berusaha kuat dan tegar untuk menyelesaikan studi ini. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN ArRaniry yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

3. Muazzinah, B.Sc., M.PA., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara beserta para staf yang telah membantu penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si., selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan waktu serta perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Orang tua tercinta, Ayahanda Jamaluddin, S.sos dan Ibunda Yulinar, S.Ag, Air mata serta keringat beliau menjadi saksi atas perjalanan studi ini. Tak hanya itu, Doa restu dari keduanya yang menjadi modal utama bagi penulis untuk bisa lancar dalam menjalani masa studi selama ini. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada “Maning” atau Yuliani, S.Si yang telah membuat penulis bersemangat untuk membuktikan bahwa penulis bisa melewati setiap fase yang semua orang anggap itu merupakan sebuah kegagalan. Dan terimakasih juga seluruh keluarga yang telah memberikan support yang begitu besar dalam penulisan ini yang tidak mungkin penulis tuliskan satu persatu.
6. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seseorang yang luar biasa yaitu Cut Mutia yang telah memberikan begitu banyak perubahan dalam hidup penulis sampai saat ini, baik itu dari proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, semoga semua hal” positive yang telah kita lakukan bersama di masa perkuliahan bisa membawa kita sampai ke titik kesuksesan dan kebahagiaan.
7. Terima kasih juga kepada penulis ingin sampaikan kepada sahabat/kawan seperjuangan yaitu Muhammad Fathan Al-Abrar, Rizki Syahrul Siyami,

Nurrahmadhana dan Abdillah Syahie yang telah memberikan dukungan baik itu berbentuk fisik maupun non fisik, semoga hal” baik yang telah kalian lakukan dapat menjadi amal jariyah untuk di akhirat nanti. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para mahasiswa/i dan dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan serta peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Peneliti,

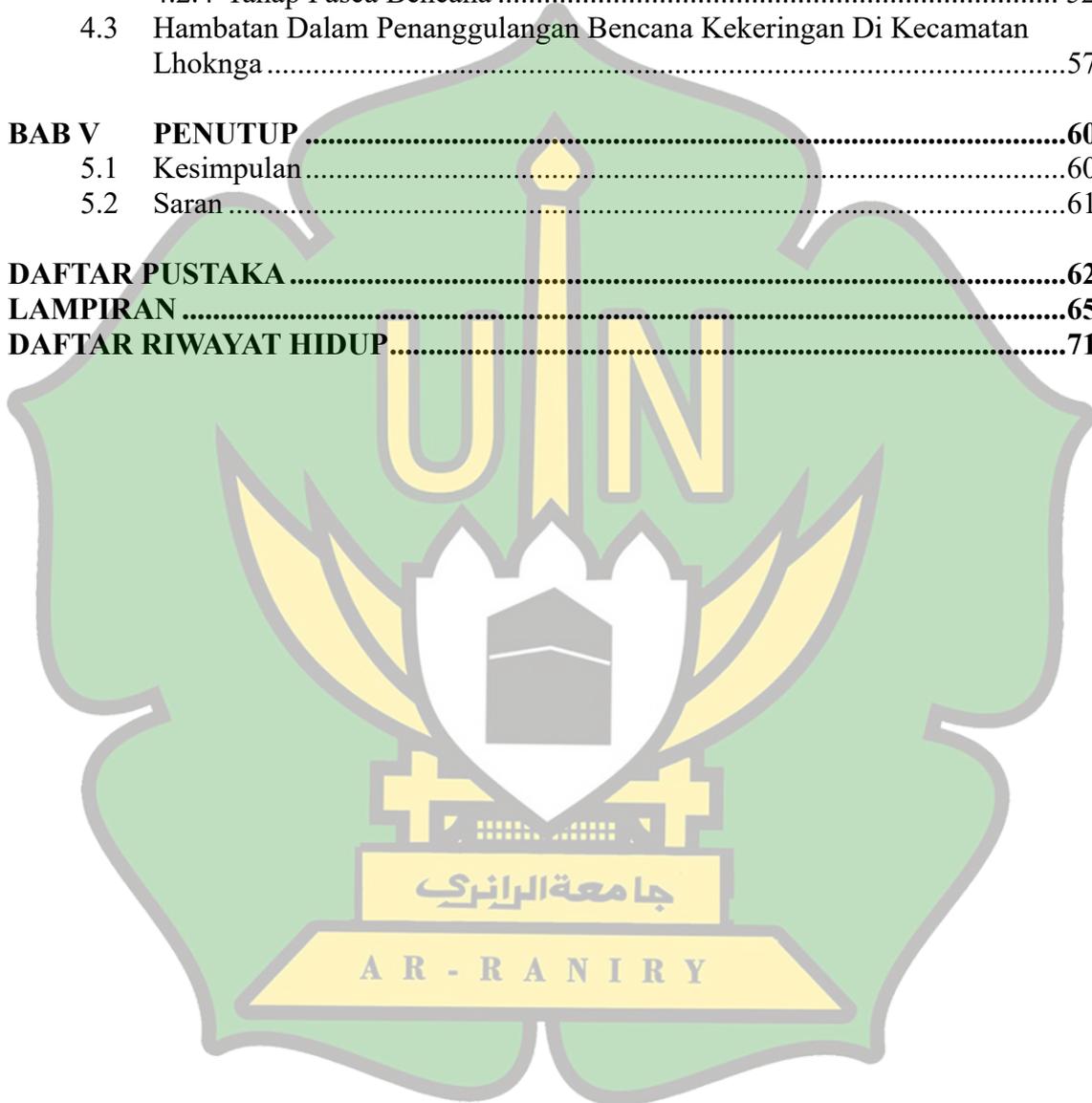
Haikal Maulana



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori peran.....	12
2.3 Konsep Koordinasi	17
2.4 Konsep Bencana	18
2.4.1 Bencana Kekeringan	22
2.4.2 Konsep Penanggulangan Bencana	23
2.5 Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4.1 Data Primer	30
3.4.2 Data Sekunder	31
3.5 Informan Penelitian	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisa Data	32
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Sejarah BPBA Provinsi Aceh	35
4.1.2 Dasar-Dasar Pembentukan BPBA Provinsi Aceh	37
4.1.3 Visi dan Misi BPBA Provinsi Aceh	38
4.1.4 Tugas dan Fungsi BPBA Provinsi Aceh.....	39

4.1.5	Struktur Organisasi BPBA Provinsi Aceh	41
4.2	Hasil dan Pembahasan	41
4.2.1	Peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).....	41
4.2.2	Tahap Pra Bencana	42
4.2.3	Tahap Tanggap Darurat	46
4.2.4	Tahap Pasca Bencana	52
4.3	Hambatan Dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Kecamatan Lhoknga	57
BAB V	PENUTUP	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	65
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



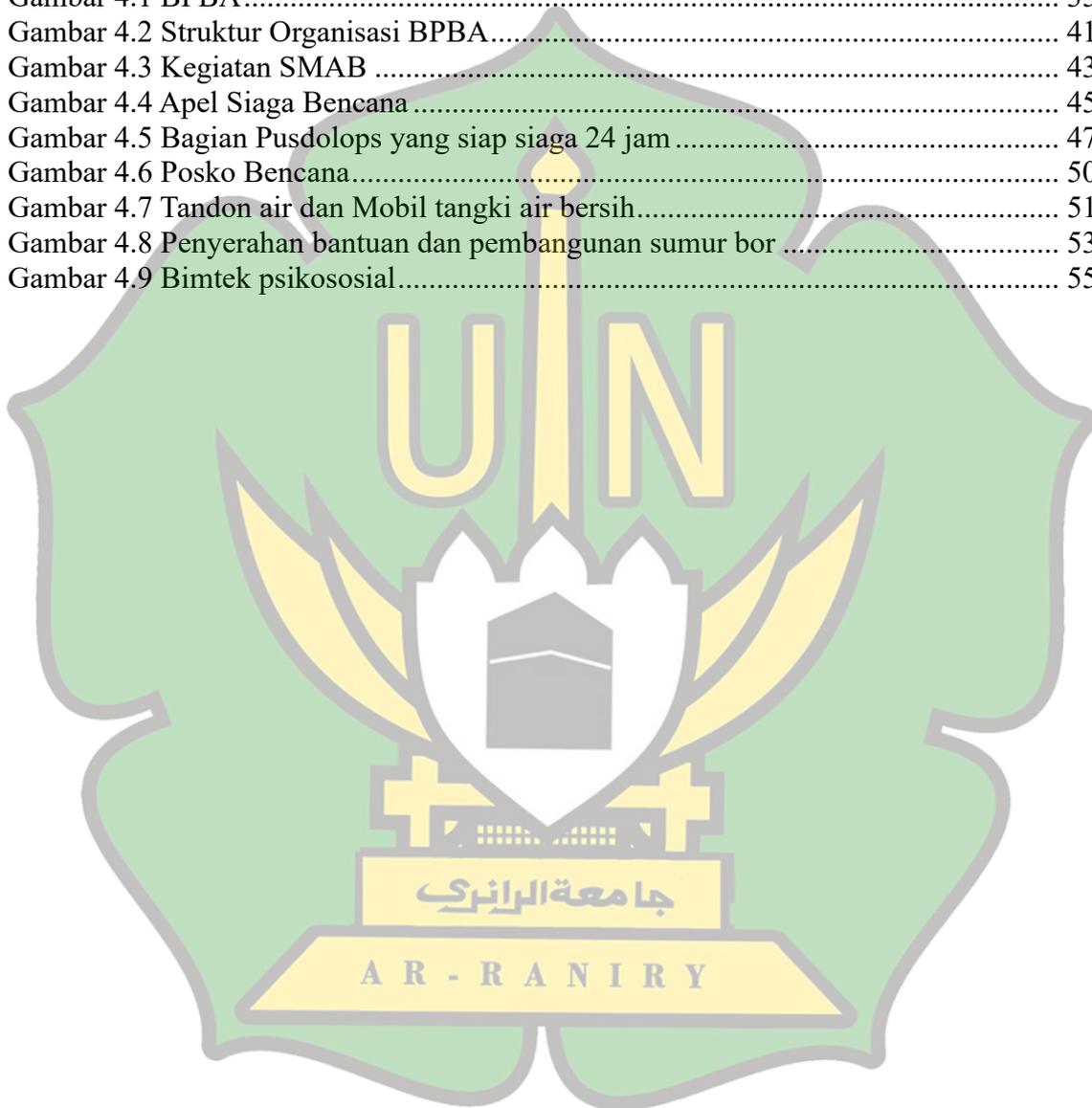
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Penelitian Peran BPBA.....	30
Tabel 3.2 Informan Penelitian	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram World Risk Indexs 2023	2
Gambar 1.2 Peta Kerentanan Kekeringan Di Provinsi Aceh.....	3
Gambar 2.1 Siklus Bencana.....	27
Gambar 4.1 BPBA.....	35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPBA.....	41
Gambar 4.3 Kegiatan SMAB	43
Gambar 4.4 Apel Siaga Bencana	45
Gambar 4.5 Bagian Pusdolops yang siap siaga 24 jam	47
Gambar 4.6 Posko Bencana.....	50
Gambar 4.7 Tandon air dan Mobil tangki air bersih.....	51
Gambar 4.8 Penyerahan bantuan dan pembangunan sumur bor	53
Gambar 4.9 Bimtek psikososial.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	65
Lampiran 2 Dokumentasi	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang letak geografisnya berada pada pertemuan tiga lempeng aktif, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga mengakibatkan Indonesia memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana. Dengan letak geografis tersebut Indonesia sudah dipastikan rentan akan terjadinya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Salah satu bencana yang sering kali melanda negara Indonesia adalah bencana kekeringan atau kemarau¹.

Bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor sosial sehingga dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis². Berdasarkan data dari laporan World Risk Index 2023, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara yang memiliki risiko bencana alam tertinggi di dunia dengan indeks sebesar 43,5 di bawah Filipina dengan indeks 46,86³. Indonesia sebagai negara yang memiliki risiko tinggi bencana harus terus melakukan monitoring, evaluasi dan mitigasi sejak dini untuk meminimalisir dampak bencana, dikarenakan bencana merupakan salah satu gejala alam yang bisa terjadi kapan saja.

¹ Yustina Sopacua and Selvianus Salakay, "Sosialisasi Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon," *Communicare: Journal of Communication Studies* 7, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.37535/101007120201>.

² Sopacua and Salakay.

³ World Risk Index 2023

Gambar 1.1 Diagram World Risk Indexs 2023



Sumber: World indeks disaster

Pada tahun 2023, Indonesia tercatat mengalami lebih dari 3.000 bencana alam yang meliputi berbagai jenis peristiwa, seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan erupsi gunung berapi. Bencana-bencana ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan dampak yang sangat luas, mulai dari kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, hingga gangguan pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang sering terdampak bencana alam sepanjang 2023 yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.⁴

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering terdampak bencana alam. Secara tata letak wilayahnya Aceh merupakan daerah dengan kondisi geologi dan geografi yang berada di jalur cincin api (ring of fire) sehingga menyebabkan beberapa bencana alam, sedangkan dari sisi hidrometeorologi, Aceh juga rentan terhadap banjir bandang, longsor, banjir luapan, dan kekeringan. Bencana kekeringan

⁴ Journal Mister, "Journal of MISTER" 1, no. 2 (2024).

merupakan fenomena yang terjadi ketika wilayah di Indonesia memasuki musim panas atau kemarau⁵.

Bencana kekeringan di tandai dengan kurangnya pasokan air pada suatu wilayah dalam kurun waktu yang berkepanjangan, biasanya beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Kekeringan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat curah hujan di bawah normal, kerusakan kawasan tangkapan air, dan pemanasan global.

Gambar 1.2 Peta Kerentanan Kekeringan Di Provinsi Aceh



Sumber: BPB Aceh.⁶

Berdasarkan peta kerentanan bencana yang di keluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh, beberapa kabupaten/kota mempunyai kerentanan yang tinggi akan terjadinya bencana kekeringan. Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten

⁵ Kuku Aji Pranata and Ananto Aji, “Analisis Spasial Tingkat Potensi Kekeringan Dan Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Grobogan,” *Indonesian Journal Conservation* 10, no. 2 (2021): 108–14, <https://doi.org/10.15294/ijc.v10i2.33138>.

⁶ Peta kerentanan kekeringan oleh BPBD Aceh (2023).

yang memiliki indeks kerentanan paling tinggi di Aceh. Pemerintah kabupaten Aceh Besar melalui BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil mengatakan bahwa, kecamatan Lhoknga merupakan daerah yang saat ini mengalami krisis kekeringan dengan status waspada. Tingkat status waspada yang ditetapkan tersebut berdasarkan jumlah wilayah yang terdampak yakni 29 desa atau gampong yang berada di kecamatan Lhoknga⁷.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, faktor utama penyebab kemarau yang berkepanjangan yang terjadi setiap tahunnya di daerah Lhoknga disebabkan oleh Keterdapatannya air tanah di Kecamatan Lhoknga yang sebagian besar berasal dari daerah karst pada media rekahan di bawah tanah, aliran air pada media rekahan ini sangat bergantung pada tingkat curah hujan dan tutupan lahan pada zona resapan. Berdasarkan data curah hujan yang disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi, BMKG Indrapuri, menunjukkan hampir setiap tahun terdapat curah hujan yang rendah di daerah Lhoknga. Khususnya pada awal tahun 2024 curah hujan rata-rata berada di bawah 100 mm, bahkan di bulan Februari yang merupakan musim hujan.

Kekeringan merupakan bencana yang sering diabaikan oleh masyarakat maupun pemerintah dikarenakan bencana ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan dengan dampak yang tidak terasa langsung oleh masyarakat oleh karena itu jika tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan banyak kerugian baik secara individu ataupun sosial. Dampak dari kekeringan yang dapat dirasakan secara langsung ialah terhambatnya aktivitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti kekurangan

⁷<https://aceh.antaranews.com/berita/362973/pemkab-aceh-besar-salurkan-277500-liter-air-bersih-di-daerah-kekeringan>

pasokan air bersih, pertanian, perkebunan maupun perekonomian⁸ Fenomena kekeringan bisa terjadi kapan saja dan sering kali mengakibatkan kerugian dengan skala yang besar, oleh karena itu untuk setiap dampak yang ditimbulkan harus segera ditanggulangi agar tidak bertambahnya kerusakan yang berkelanjutan ke depannya. Penanggulangan dampak bencana sudah tercantum dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945. Yang mana dalam alinea tersebut dapat ditafsirkan bahwa “merupakan kewajiban Negara” untuk melindungi seluruh penduduk dan lingkungan hidup Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Semakin cepat penanggulangannya, semakin minim dampak yang dapat dimitigasi dan semakin cepat proses rehabilitasi yang dapat dilakukan⁹ Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan oleh setiap badan penanggulangan bencana yang berada di pusat maupun daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki fungsi dalam memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. BNPB pusat juga dibentuk sebagai pusat koordinasi antara setiap institusi dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan bencana. Oleh karena itu

⁸ Bagas Aditya Dwilucky and Calvin Edo Wahyudi, “Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Good Governance,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 5 (2024): 2172–81, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.1053>.

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini dibuat guna untuk mencapai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat terkoordinasi secara baik, sehingga dapat terbentuk suatu penanggulangan bencana yang terpadu dan tersistematisasi dengan baik yang akan dilakukan oleh pemerintah Pusat, ke Daerah dan Kabupaten kota¹⁰

Menurut Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Qanun ini berfungsi sebagai landasan hukum bagi upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan pasca bencana. Dalam qanun ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko bencana dan mengatur sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar setiap bencana dapat diatasi.¹¹ Peran BPBA sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung dalam penanggulangan bencana menjadi kunci dalam mengatasi bencana kekeringan di kecamatan Lhoknga. Dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) memainkan peran penting dalam menjalankan tugasnya. BPBA bertanggung jawab atas mitigasi bencana pada tingkat daerah provinsi yang mencakup beberapa fase yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana yang diatur dalam Pergub Aceh Nomor 104 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja BPBA.¹²

Namun, upaya penanggulangan bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga harus menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat

¹⁰ Dodi Monardo, "Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 Rencana Nasional," 2022.

¹¹ Qanun Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah Aceh.

¹² Pergub Aceh Nomor 104 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja BPBA.

bahkan aparaturnya terhadap mitigasi bencana, keterbatasan dana darurat, kurangnya kapasitas SDM, serta kesiapsiagaan dari masyarakat dan peralatan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan peran BPBA dalam melakukan mitigasi bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Melalui program-program mitigasi bencana yang telah disusun, diharapkan BPBA dapat memberikan perlindungan, bantuan dan pengetahuan tentang bencana yang efektif kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan¹³.

Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana sangat berguna dalam mengurangi resiko dari dampak terjadinya bencana. Pengetahuan kebencanaan berarti masyarakat mampu memahami mulai dari ciri-ciri, tanda- tanda, maupun hal-hal yang dapat menimbulkan atau menyebabkan bencana. Dari pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan timbul sebuah sikap untuk mencegah atau meminimalisir hal-hal tersebut, ketika sebuah sikap sudah dilakukan secara terus- menerus maka akan muncul sebuah perilaku sadar bencana dimasyarakat. Masyarakat sadar bencana dapat didefinisikan sebagai ‘masyarakat yang mampu mengetahui, memahami, dan peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran BPBA dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengenai proses penanggulangan bencana, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi

¹³ Tipe-Tipe Turap Et Al., “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Tanggap Darurat Pada Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Aceh Besar,” N.D., 1–17.

¹⁴ Dimas Septian Galih Pramudya, “Efektivitas Pelaksanaan Mitigasi Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah,” 2022.

dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja BPBD, tetapi juga menyajikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat peran mitigasi dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Pergub Aceh Nomor 104 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja BPBA. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam peran BPBA dalam penanggulangan bencana dengan judul **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kecamatan Lhoknga”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya peran BPBA dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga
2. Dampak yang ditimbulkan dari bencana kekeringan
3. Kurangnya kesadaran mitigasi bencana oleh Masyarakat

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BPBA dalam penanggulangan bencana kekeringan di kecamatan Lhoknga?

2. Apa saja hambatan dalam penanggulangan bencana kekeringan di kecamatan Lhoknga?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah di atas, peneliti memperoleh sejumlah pembahasan sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan dan menelaah peran BPBA dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan apa saja yang menjadi penghalang dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian di atas, peneliti memperoleh sejumlah pembahasan sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadin landasan diskusi dalam meningkatkan pengetahuan peran BPBA dalam penanggulangan bencana, serta untuk memberi kita lebih banyak informasi tentang apa saja yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk menangani bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga dan bagaimana BPBA melakukan perannya untuk mengatasi bencana kekeringan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menangani bencana kekeringan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

